

Perilaku Kompetitif dan Aksi Ambil Untung Di Balik Kemandekan Tata Kelola Bantaran Sungai Ciliwung

Oleh Prudensius Maring^{*)}, Fordolin Hasugian^{*)}, Retor AW Kaligis^{*)}

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan perilaku kompetitif yang berlangsung secara kolektif di balik kemandekan pembangunan bantaran sungai. Kemandekan terlihat melalui ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya program penataan bantaran sungai. Hal ini memperkuat karakter bantaran sungai yang berciri akses-terbuka dan penyerap kehadiran pendatang di bantaran sungai. Perilaku eksploitatif secara kolektif terlihat dalam bentuk persaingan penguasaan sumberdaya, perebutan daerah aliran sungai, aksi ambil untung, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Kemandekan pembangunan, perilaku kompetitif, dan aksi ambil untung menghasilkan perilaku resistensi yang menghambat gagasan perubahan sosial dan ekologis. Tulisan ini menginspirasi perspektif antropologi ekologi dan antropologi perkotaan. Penelitian menggunakan metode wawancara mendalam dan pengamatan terlibat pada masyarakat bantaran sungai Ciliwung di Jakarta Timur.

Kata kunci: Ciliwung, kemandekan, perilaku kompetitif, aksi ambil untung, bantaran sungai, masyarakat kota.

ABSTRACT

This article explain competitive behavior collectively behind the stagnation of watershed development. The stagnation visible through uncertainty of regulation of watershed tenure, uncertainty of law enforcement, and stagnated of watershed normalization program. The problem above strengthen the character of watershed that open access and absorptive the urban community on watershed. The competitive behavior collectively on watershed resources visible on competition of watershed tenure, robbery the area on watershed, action of take profit, behavior of throw the rubbish to river, and bad management of rubbish. Stagnation of development, competitive behavior, and action of take profit collectively result the behavior of resistance that block the new idea for social and ecological change. This article inspire to perspective of ecological anthropology and urban anthropology. The research used method indepth-interview and participatory observation on the community of Ciliwung watershed in East Jakarta.

Keywords: Ciliwung, stagnation, competitive behavior, action of take profit, watershed, urban community.

A. PENDAHULUAN

Tulisan ini bermaksud menjelaskan fenomena persaingan dan perebutan sumberdaya alam di balik pembangunan bantaran sungai. Ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya penerapan program penataan bantaran sungai telah bersinergi dengan perilaku kompetitif dan aksi ambil untung yang dilakukan berbagai pihak. Perilaku persaingan dan aksi ambil untung terlihat melalui penguasaan sumberdaya, perampasan daerah aliran air sungai, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Ketidakpastian pengaturan bantaran sungai memperkuat karakter bantaran sungai yang berciri akses-terbuka dan menyerap kehadiran masyarakat di bantaran sungai. Kemandekan pembangunan bantaran sungai dan perilaku kompetitif yang dijalankan secara kolektif bermuara pada munculnya perilaku resistensi yang menghambat gagasan perubahan kehidupan sosial dan ekologis.

^{*)} Ketiga penulis merupakan Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Widuri, Jakarta.

Secara fisik, luas wilayah DKI Jakarta adalah 66.152.000 Ha (atau sekitar 662 Km²). Wilayah tersebut dilalui 13 sungai/kali yang memiliki cabang dan sub cabang dengan total sekitar 29 sungai/kali/situ. Dari jumlah tersebut, sebanyak 83% di antaranya memiliki kualitas air dalam kondisi buruk dan sekitar 17% di antaranya memiliki kualitas air dalam kondisi sedang. Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung melintas di tengah kota Jakarta setelah melintasi wilayah kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Pembangunan di wilayah hulu dan pada wilayah yang dilalui sungai Ciliwung telah merusak daerah aliran sungai dan menghilangkan daya resap lebih dari 80%. Hingga tahun 1980, daerah aliran sungai yang telah berubah fungsi mencapai 18.415,26 Ha terdiri dari kawasan perumahan (10.857,63 Ha), kawasan industri (4.960,05 Ha), dan jasa perdagangan (2.596,58 Ha). Wilayah bantaran sungai di wilayah Jakarta merupakan sumber lahan pemukiman masyarakat. Sebagian pemukiman di bantaran sungai Ciliwung termasuk kategori kumuh karena memiliki infrastruktur dasar buruk. Hal ini berarti kondisi bantaran Ciliwung menyumbang terhadap 392 RW kumuh dan 64 kampung miskin di Jakarta (lihat BPDAS Citarum-Ciliwung, 2009; Irawaty, 2012; Anonim, 2014; Maring, *et al*, 2014).

Akibat alih fungsi daerah aliran sungai, hilangnya daya resap air hujan, dan menguatnya perilaku kompetitif dan aksi ambil untung secara berlebihan dari alam adalah timbulnya banjir bandang secara rutin. Sejarah banjir Ciliwung telah berlangsung sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Dampak banjir secara sosial ekonomi makin terasa sejalan kemajuan pembangunan berciri fisik-ekonomi yang secara langsung mengancam keberadaan bantaran sungai. Sejak tahun 2007, selain menerjang pemukiman di bantaran sungai Ciliwung, banjir mulai merambah pemukiman elit, pusat perekonomian dan jalan protokol (Kompas, 10/2/2007). Dampak banjir yang dialami masyarakat secara berulang-ulang dan konsisten memperumit strategi sosial, ekonomi, ekologi masyarakat. Situasi demikian mengonstruksi pola adaptasi berciri involutif. Sebuah strategi bertahan hidup dengan cara membuat kerumitan-kerumitan baru ke arah dalam yang berujung pada terjadinya mekanisme berlari-lari di tempat sambil membagi-bagi kemiskinan (*shared poverty*). Tindakan yang dilakukan belum menyentuh persoalan mendasar yang menyebabkan terjadinya banjir. Kita mulai bergerak ketika banjir datang. Tindakan preventif yang berdampak jangka panjang masih jarang dilakukan (Maring, 2007; Maring, *et al*, 2014).

Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah melihat fenomena lahirnya perilaku kompetitif dan aksi ambil untung secara kolektif pada masyarakat bantaran sungai di balik ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya penerapan program penataan bantaran sungai. Perilaku ambil untung secara kolektif terlihat dalam bentuk persaingan penguasaan sumberdaya, perampasan daerah aliran sungai, perilaku ambil untung, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Ketidakpastian pengaturan bantaran sungai memperkuat karakter bantaran sungai yang berciri terbuka dan menyerap kehadiran masyarakat di bantaran sungai. Involusi pembangunan dan perilaku kolektif destruktif bermuara pada munculnya perilaku resistensi yang menghambat gagasan perubahan kehidupan sosial dan ekologis. Tulisan ini bersumber dari penelitian tentang involusi perkotaan dan strategi sosial ekonomi masyarakat bantaran sungai Ciliwung. Tulisan ini adalah potret dari keseluruhan implikasi pembangunan yang terjadi pada masyarakat perkotaan di bantaran sungai Ciliwung.

Penelitian ini menginspirasi perspektif ekologi budaya (Geertz, 1963) dan antropologi perkotaan (Suparlan, 2004). Perspektif ekologi budaya menekankan inti kebudayaan (*cultural core*) meliputi pola-pola

sosial, politik, dan organisasi sosial. Pandangan ini menjadi titik masuk memahami strategi sosial, budaya, dan ekonomi yang dijalankan masyarakat perkotaan di bantaran sungai. Perspektif ekologi budaya bisa menjelaskan strategi sosial ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat; perspektif antropologi perkotaan bisa menjelaskan *setting* realitas kehidupan masyarakat perkotaan yang dinamis, kompleks, dan cenderung bersifat rumit. Strategi sosial ekonomi yang dijalankan masyarakat tidak berlangsung di ruang kosong. Strategi tersebut selalu berhubungan dengan realitas sosial politik lebih luas yang dialami masyarakat sebagai “masyarakat perkotaan” yang dinamis, kompleks, dan rumit (involutif) (lihat Maring, *et al*, 2014).

Konsep involusi menggambarkan kebudayaan yang sudah mencapai pola mapan jika tidak mampu mendinamiskan dirinya akan mengalami kerumitan ke dalam (*involutive*) dan melahirkan kemandekan (Geertz, 1963; lihat Maring, *et al*, 2014). Konsep involusi memberi inspirasi untuk menjelaskan, apakah *setting* bantaran sungai di wilayah perkotaan yang dipenuhi ketidakpastian pengelolaan dapat melahirkan perilaku kolektif destruktif pada masyarakat. Fenomena penyempitan aliran sungai, aksi ambil untung secara sepihak atas sumberdaya sungai, aksi membuang sampah ke sungai, dan perilaku enggan pindah meski diterjang banjir secara berulang merupakan bentuk perilaku kolektif destruktif. Permasalahan perkotaan yang menjadi sasaran kajian antropologi perkotaan berpangkal pada kebudayaan perkotaan dan pranata-pranata sosial yang hidup dan berkembang di kota (Suparlan, 2004). Pandangan tersebut menegaskan bahwa kajian antropologi perkotaan tidak sekadar memosisikan kota sebagai *setting* fisik-lokasi semata. Sebaliknya, perspektif antropologi perkotaan memosisikan kota sebagai orientasi konseptual, menggali pola-pola yang berlaku secara empirik, menggunakan pendekatan holistik, dan melihat hubungan antara pola-pola kelakuan/ budaya dengan masyarakat yang lebih luas (Suparlan, 2004; lihat Maring, *et al*, 2014).

B. METODE DAN SUMBER DATA

Untuk menjelaskan masalah di atas maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Creswell, 2010). Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan pengambilan foto. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan pengumpulan dokumen ke instansi/ lembaga yang relevan. Kegiatan penelitian berlangsung selama tahun 2014. Proses penggalian data selalu dikaitkan dengan tema yang berhubungan dengan strategi sosial-ekonomi yang dijalankan masyarakat, intervensi program pembangunan bantaran sungai yang dijalankan pemerintah, dan intervensi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan *stakeholders* lainnya. Penggalian data dilakukan secara progresif dengan mengandalkan formulasi pertanyaan bersifat progresif kontekstual. Keterbatasan waktu turut mempengaruhi proses pengumpulan data.

Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari hasil penelitian tentang “Involusi Perkotaan dan Strategi Sosial Ekonomi Masyarakat Bantaran Sungai Ciliwung” yang berlangsung selama tahun 2014 dengan biaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Penelitian yang dirancang dalam waktu 3 tahun ini bermaksud mempelajari dan menjelaskan masalah atau pertanyaan penelitian berikut: (1) Bagaimana strategi sosial ekonomi yang dikembangkan masyarakat perkotaan yang terkena banjir secara berulang di bantaran sungai; (2) Bagaimana realitas involusi dalam kehidupan masyarakat perkotaan yang tinggal di bantaran sungai.

Dengan demikian, tulisan ini hanya sebuah potret dari keseluruhan implikasi pembangunan yang terjadi pada masyarakat perkotaan di bantaran sungai Ciliwung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan beberapa hal berikut: *Pertama*, potret komunitas dengan strategi sosial yang dijalankannya. Gambaran tersebut hanya memberi titik masuk dan tidak untuk membatasi pihak lain dalam analisis ini karena masalah yang terjadi di bantaran sungai tidak lepas dari peran banyak pihak di luarnya. *Kedua*, perilaku kompetitif dan aksi ambil untung. Perilaku tersebut terlihat dalam bentuk persaingan penguasaan sumberdaya, perampasan daerah aliran sungai, perilaku ambil untung, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Perilaku tersebut tumbuh subur secara kolektif karena bersinergi dengan ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya penerapan program penataan bantaran sungai. *Ketiga*, penting dibangun perilaku kolektif konstruktif. Perilaku ini harus diwujudkan dalam aksi-aksi penanaman kembali atas lahan gundul, pemeliharaan bantaran sungai, normalisasi sungai/danau, pengolahan sampah, malu membuang sampah ke sungai, yang dilakukan secara kolektif untuk kepentingan bersama.

Bagian ini menjelaskan beberapa hal berikut: *Pertama*, potret komunitas dengan strategi sosial yang dijalankannya. Gambaran tersebut hanya memberi titik masuk dan tidak untuk membatasi pihak lain dalam analisis ini karena masalah yang terjadi di bantaran sungai tidak lepas dari peran banyak pihak di luarnya. *Kedua*, perilaku kompetitif dan aksi ambil untung. Perilaku tersebut terlihat dalam bentuk persaingan penguasaan sumberdaya, perampasan daerah aliran sungai, perilaku ambil untung, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Perilaku tersebut tumbuh subur secara kolektif karena bersinergi dengan ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya penerapan program penataan bantaran sungai. *Ketiga*, penting dibangun perilaku kolektif konstruktif. Perilaku ini harus diwujudkan dalam aksi-aksi penanaman kembali atas lahan gundul, pemeliharaan bantaran sungai, normalisasi sungai/danau, pengolahan sampah, malu membuang sampah ke sungai, yang dilakukan secara kolektif untuk kepentingan bersama.

1. Potret komunitas dan strategi sosialnya

Pembangunan bantaran sungai Ciliwung dilaksanakan melalui proyek penanggulangan banjir dan normalisasi sungai. Proyek tersebut bertujuan mengatasi berbagai masalah sosial-ekologis di bantaran sungai, kali, dan situ. Melalui kedua program tersebut, masalah banjir diatasi melalui perbaikan daerah aliran air dan wilayah tangkapan air. Program tersebut juga diharapkan dapat mengatasi masalah pemukiman dan kehidupan sosial/ekonomi masyarakat di bantaran sungai/situ. Meski demikian, bagi masyarakat hingga sekarang masih simpang siur informasi tersebut. Apakah wilayah pemukiman mereka akan terkena proyek normalisasi dan pemusatan pemukiman di rumah susun. Masyarakat mengeluhkan, hingga sekarang belum ada pembicaraan langsung dengan masyarakat tentang kepastian proyek normalisasi sungai. Sebagian masyarakat yang rumahnya menjadi langganan banjir karena terletak di aliran sungai terlihat pasrah jika terkena proyek

normalisasi. Perhatian utama masyarakat adalah kepastian kompensasi dan keberlanjutan mata pencaharian (Mikmah, 2010; Arifianto, 2009; Maring, *et al*, 2014).

Warga bantaran sungai Ciliwung pada lokasi penelitian berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Kondisi ini memungkinkan lahirnya konstruksi struktur sosial komunitas bantaran sungai yang berciri heterogen. Struktur sosial heterogen tersebut sejalan dengan pola interaksi sosial yang dibangun, yaitu pola interaksi intrakelompok/ asal-usul dan pola interaksi interkelompok/ asal-usul. Proses interaksi intrakelompok/ asal-usul terlihat melalui aktivitas dan interaksi sosial yang dibangun dalam masing-masing kategori warga berdasarkan asal usul tersebut dan kesamaan keyakinan keagamaan. Warga yang berasal dari daerah yang sama membangun hubungan dan relasi khusus berdasarkan asal-usul tersebut melalui kegiatan arisan keluarga, kegiatan sosial, dan doa bersama (persekutuan) yang berlangsung terus-menerus. Proses ini membentuk pola relasi dan hubungan sosial bersifat khas berdasarkan kesamaan asal-usul. Proses tersebut secara ekstensif melibatkan warga seasal-usul yang tinggal di luar bantaran sungai. Proses membangun relasi dan interaksi sosial yang bersifat menyebar-keluar ini bisa menjelaskan tidak terjadinya budaya dominan (*dominant culture hypothesis*) dalam kehidupan masyarakat di bantaran sungai Ciliwung (Lubis, 2005; lihat Maring, *et al*, 2014).

Pada tingkat lebih luas, penelitian ini memperlihatkan masyarakat bantaran sungai membangun interaksi lintas kelompok asal-usul dan keyakinan keagamaan. Upaya membangun interaksi lintas kelompok dan konstruksi struktur sosial yang lebih luas tersebut berlangsung melalui proses formal dan informal. Masyarakat secara sengaja mengembangkan pola relasi-interaksi yang menjembatani dinamika kelompok-kelompok “lebih kecil” melalui kegiatan-kegiatan formal dan kegiatan sosial yang melibatkan seluruh warga di tingkat RW. Melalui peran aparat pemerintah, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, berbagai kegiatan sosial melibatkan semua warga di bantaran sungai. Peran aparat dari tingkat RW dan RT bisa memberi kenyamanan bagi warga. Melalui peran tokoh formal dan informal pula dilaksanakan kegiatan sosial berupa arisan “Bapak-bapak” secara rutin. Melalui arisan warga ini berbagai masalah sosial dibahas dan dicarikan jalan keluar. Di tingkat RT terdapat arisan “Ibu-ibu” yang dilaksanakan secara rutin. Dinamika kehidupan masyarakat di tingkat kelompok kecil dan dalam konteks wilayah yang lebih luas mengonstruksi nilai dan norma untuk dijadikan pegangan dalam kehidupan bersama (lihat Maring, *et al*, 2014).

Gambaran di atas memperlihatkan bahwa masyarakat bantaran sungai mengonstruksi norma dalam kehidupan bersama berdasarkan nilai keagamaan, daerah/asul-usul, dan tujuan kehidupan bersama yang dikonstruksi secara formal. Pelajaran penting yang bisa ditarik dari proses membangun relasi-interaksi sosial yang dijalankan masyarakat bantaran sungai adalah lahirnya konstruksi struktur sosial yang berlapis-lapis, berulang, dan bertumpang-tindih peran sebagai respon terhadap realitas banjir berulang yang dihadapi masyarakat bantaran sungai. Terlihat bahwa struktur sosial yang dibangun selalu berorientasi pada fungsi-fungsi untuk saling membantu dan meringankan tekanan yang diakibatkan banjir. Seorang warga harus terlibat dalam berbagai struktur organisasi yang ada sebagai strategi mengamankan diri. Kondisi ini memungkinkan struktur sosial yang terbangun bersifat fleksibel dan terhindar dari ketimpangan-ketimpangan sosial. Struktur sosial yang dibangun tidak untuk memperkuat posisi elit tertentu, tetapi untuk membantu pihak-pihak yang dipandang lemah (lihat Maring, *et al*, 2014).

2. Perilaku kompetitif dan aksi ambil untung

Gambaran di atas memperlihatkan berlangsungnya proses konstruksi nilai-norma, struktur sosial, dan strategi sosial yang secara fungsional membantu masyarakat dalam mengatasi masalah banjir rutin. Meski demikian, di balik keberhasilan tersebut lahir perilaku ambil untung secara kolektif atas sumberdaya bantaran sungai. Banjir yang terjadi secara berulang, di satu sisi mendorong masyarakat mengembangkan struktur sosial dan strategi sosialnya, tetapi pada sisi lain melahirkan cara pandang negatif atas sungai. Sungai tidak dilihat sebagai *resources* yang harus dipelihara dan dirawat, tetapi sebagai sumberdaya yang harus diperebutkan. Konsepsi *public goods* yang harus dikelola secara baik berubah menjadi *public bads* yang dijadikan sasaran pembuangan sampah, pendangkalan, dan penyempitan (lihat Tim Ekspedisi Ciliwung KOMPAS, 2009). Bantaran sungai Ciliwung menjadi arena pertarungan, persaingan, dan perebutan yang diperagakan banyak pihak.

Banjir yang melanda kehidupan warga Jakarta adalah akibat pertarungan kepentingan berbagai pihak di wilayah hulu dan hilir. Banjir berulang menunjukkan menguatnya kepentingan dan lemahnya aturan. Hal ini mengingatkan tesis *tragedy of the commons* (Hardin, 1968). Penggunaan sumber daya bersifat terbuka yang tidak terkendali, bakal menimbulkan kerusakan dan tragedi kemanusiaan. Hardin mengusulkan privatisasi kepemilikan sumber daya dengan aturan bersifat mengikat dan memaksa. Meski dikritik, tesis ini mempengaruhi sistem penguasaan sumber daya alam di banyak negara. Sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi, yang semula merupakan milik bersama diklaim sebagai milik negara. Negara memberi hak penguasaan dan pengelolaan kepada lembaga privat seperti perusahaan swasta atau perusahaan negara. Ironisnya, pemerintah tak menaruh minat untuk mengelola 13 bantaran sungai di wilayah DKI. Bantaran sungai jadi wilayah terbuka untuk diakses warga. Sejak 40-50 tahun silam, bantaran sungai menjadi rebutan para urban yang menyerbu kota Jakarta. Hingga kini sekitar 71.000 rumah tangga atau 700.000 jiwa menghuni bantaran kali (Kompas, 2007).

Ketika penduduk kian padat, tindakan warga untuk menguasai dan melindungi lahannya dari banjir dan orang lain dilakukan dengan banyak cara. Aksi ini marak saat pemegang otoritas penataan ketertiban dan pemukiman kota belum menunjukkan aksi konkrit dan menyentuh masalah. Daerah aliran air menjadi sumber daya yang diperebutkan. Banyak cara dilakukan untuk mempertahankan lahan dan harta kekayaan dari banjir. Rumah dibangun permanen dan bertingkat. Lahan di bibir kali ditimbun lebih tinggi dan terus menjorok ke kali. Hal ini bertujuan menghindari banjir sekaligus memperluas klaim pemilikan lahan. Tindakan ini mempersempit alur sungai, sementara volume air terus meningkat. Aliran air terjepit dari kedua sisi berlawanan. Di beberapa tempat, semula lebar sungai mencapai 30 meter kini tinggal 10 meter, bahkan kurang. Di beberapa tempat, pemilik lahan melakukan aksi berlawanan dari kedua sisi kali Ciliwung. Yang satu meninggikan lahannya dengan tanah *urugan* (tanah hasil timbunan), yang lain membangun tembok pagar lebih dari 4 meter. Akibat penyempitan itu, banjir menerjang ke mana-mana. Rumah-rumah yang biasanya aman, hancur akibat bobolnya tembok. Aksi-aksi semacam ini berlangsung di mana-mana. Daerah aliran sungai menjadi arena terbuka bagi penghuni bantaran kali untuk mengklaim dan memperkuat pertahanan dari terjangkit banjir (Maring, 2007; Maring, 2006).

Mengapa terjadi aksi ambil untung untuk kepentingan sendiri? Mengikuti tesis Hardin, hal ini akibat lemahnya aturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Tindakan cari untung ini berhubungan dengan

buruknya peran pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah selalu berwajah proyek dengan dana triliunan rupiah. Pasca banjir besar tahun 2002, misalnya, dana sekitar Rp 17 triliun dialokasikan untuk revitalisasi tata ruang dan normalisasi daerah aliran sungai. Ironisnya, upaya menata kembali pemukiman di bantaran kali selalu dianak-tirikan. Padahal, hingga tahun 2007 sekitar 71.000 keluarga atau sekitar 700.000 jiwa mendiami bantaran sungai (Wawa, 10/2/2007). Alasannya, biaya ganti rugi yang besar karena calo ikut bermain. Lahan warga yang dibeli calo jadi mahal. Informasi yang mencuat adalah proyek besar seperti normalisasi Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat, namun program normalisasi sungai asing bagi warga. Warga hanya pernah dengar tapi tidak pernah paham program normalisasi sungai. Situasi ini membutuhkan tindakan konkrit dan aturan yang berwibawa, tidak hanya bersifat memaksa. Aparat penegak aturan harus bersih dari permainan uang dan sogok-menyogok. Aksi cari untung para calo, mungkin karena ada informasi dari dalam. Faktor yang sering menghambat proses pembebasan tanah adalah sogok.

Argumentasi bahwa manusia adalah pusat dan lingkungan alam sebagai pendukung, bersinergi dengan ketamakan manusia. Sinergi ini menyulut persaingan antarmanusia untuk memperebutkan sumberdaya alam. Ketamakan dan pesaingan mengonstruksi mentalitas eksploitatif. Lingkungan alam yang semula dipandang untuk memuliakan manusia berbalik menghancurkan manusia. Jiwa dan raga, harta benda sosial/ekonomi, simbol kebanggaan dan keangkuhan manusia diporakporandakan fenomena alam. Banjir di tengah ibu kota negara Indonesia adalah pentas ketamakan dan mentalitas eksploitatif yang dijalankan secara kolektif. Intervensi berupa penyempitan dan pendangkalan sungai/kali, penimbunan danau dan parit, tidak lagi untuk memelihara lingkungan alam. Semua intervensi kita bertujuan mengambil manfaat dan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan manusia. Ketamakan dan persaingan membutakan kita, hingga mengancam kemanusiaan kita sekalipun.

Bagaimana manusia mesti menempatkan dirinya dalam sistem alam, masih menjadi perdebatan dalam perspektif etika lingkungan. Ada kelompok yang secara tegas menempatkan posisi manusia sebagai pusat (*antroposentrisme*). Dalam hal ini manusia bisa melakukan apa saja terhadap komponen alam lainnya untuk memelihara kepentingannya. Di sisi lain, ada kelompok yang berjuang menempatkan posisi manusia sebagai bagian dari alam (*biosentrisme*). Dalam hal ini eksistensi manusia tergantung kepada komponen alam lainnya. Karenanya manusia tidak bisa berlaku sekehendak hati, harus memperhitungkan dampaknya terhadap komponen alam lain atas langkah-langkahnya. Sekalipun masih pro dan kontra, manusia terus melakukan eksploitasi berlebih terhadap alam. Hal ini bisa dilihat dengan jelas dalam aktivitas penebangan kayu, penggundulan hutan alam untuk pertambangan, pertanian, peternakan, dan pemukiman, baik secara legal maupun ilegal. Aktivitas tersebut telah menghancurkan vegetasi dan mengganggu wilayah resapan air hujan secara alamiah (Maring, 2006).

Berulang kali masyarakat mengalami ancaman banjir tetapi tetap bergeming. Ketamakan dan persaingan kolektif membuat kita terus merusak aliran sungai dan mengeksploitasi lingkungan alam. Kita enggan memelihara lingkungan karena tindakan itu dipandang tidak sejalan dengan kebiasaan umum. Kita terus membuang sampah ke sungai dan menyempitkan sungai/kali karena orang lain biasa melakukan itu. Kita takut kehilangan bagian dari sumberdaya alam. Tindakan memelihara lingkungan dipandang tidak populer. Pemerintah berkilah, banjir tahun-tahun terakhir ini lebih kecil dari banjir tahun 2007. Namun banjir tahun-

tahun terakhir ini merontokkan terminologi "banjir kiriman" yang kerap menjadi pembelaan warga Jakarta dan penghakiman atas wilayah hulu. Banjir tahun-tahun terakhir ini memecah kemapanan rutinitas warga Jakarta. Banjir mengacaukan jalan-jalan utama, menenggelamkan perumahan mewah, melumpuhkan pusat kegiatan ekonomi, menerobos ke istana negara, dan mengacaukan acara kenegaraan.

Akumulasi dari suburnya perilaku kompetitif, maraknya aksi ambil untung, dan lemah tata kelola membuahkan wajah bantaran Ciliwung yang kompleks, rumit, dan involutif. Bantaran Ciliwung dari hulu ke hilir bagai media/kanvas yang siap dilukis, yang diklaim sebagai sumberdaya bersama, yang menggiurkan banyak pihak untuk ambil bagian melukis sesuai selera masing-masing. Setiap pihak tidak hanya menjaga areal klaimnya dari serbuan pihak lain yang berdatangan, tetapi juga terus melukis pada bidang yang sama. Karena semua pihak menjalankan strategi dan taktik yang sama sehingga akhirnya wajah Ciliwung dipenuhi garis tumpang tindih, makin rumit, hingga akhirnya mandek, dan enggan berubah.

3. Bangun perilaku kolektif konstruktif

Ciliwung adalah panggung yang jujur mementaskan ulah kemanusiaan kita. Ia tidak kenal hukum dramaturgi, pentas belakang (*back stage*) dan pentas depan (*front stage*). Kebobrokan yang bekerja dalam pikiran terdalam dan tindakan tersembunyi pada tingkat individu, rumah tangga, dan institusi pemerintah, terpentas dalam panggung terbuka bernama "Ciliwung". Sampah yang berlimpah, air sungai yang berbau, dan luapan banjir ke mana-mana, adalah cermin pikiran, tindakan, dan wajah kemanusiaan kita. Di sini, pentingnya kita melihat ke dalam dan menata mental kita, bukan tergesa-gesa memoles dengan proyek fisik semata. Banjir yang menyisahkan lumpur tebal di permukiman adalah simbol ketamakan yang diperagakan manusia terhadap alam dan antarmanusia. Lumpur adalah anugerah bagi para petani di lereng gunung dan dataran persawahan. Lumpur adalah simbol kesuburan bagi kaum tani yang menghuni negara agraris ini. Tapi, kini ia menjadi petaka bagi manusia perkotaan yang kian menjauhkan diri dari tanah dan lumpur. Sekalipun banyak kaum urban masih mewarisi "darah" tani dari pedesaan, ia tidak mampu menghadapi dan mendayagunakan lumpur yang dikirim tiba-tiba. Lumpur memenuhi rumah dan membalut erat perabotan rumah warga (Maring, 2007).

Dalam tragedi banjir yang terjadi, paling tidak akan muncul dua pertanyaan berikut: Siapa yang paling dirugikan atau menjadi korban? Siapa yang paling bertanggung jawab atas tragedi ini? Pertanyaan ini selalu muncul sebagai reaksi atas peristiwa banjir atau longsor. Jika diperhatikan, kedua pertanyaan ini bertendensi meneropong keluar, melihat peran-peran yang berada di luar diri kita sendiri. Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa menghasilkan daftar panjang kesalahan orang lain. Dalam konteks totalitas kesatuan komunitas ekosistem, cara pandang tersebut kurang efektif. Ia tidak membantu menyelesaikan kemerosotan lingkungan karena peristiwa seperti banjir dan longsor akan ditemukan sebagai hal yang berhubungan dengan perilaku orang lain dan terpisah dari perilaku kita sendiri (Maring, 2006).

Tragedi banjir mendorong kita melakukan refleksi untuk melihat korelasi antara berbagai bencana banjir dan longsor dengan perilaku kita. Proses ini diharapkan membantu membangun kesadaran bersama bahwa kita sedang menghadapi sebuah persoalan serius yaitu keringkahan alam yang akan mengancam kehidupan manusia. Tragedi ini adalah akibat tindakan kolektif, sistematis, berlangsung di berbagai tempat secara serentak, dalam skala kecil dan besar, dalam merusak alam. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan

kesadaran dan tindakan bersama yang didukung komitmen kuat dari pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Dukungan kebijakan dan keputusan politik yang efektif dalam hal tata guna lahan, intervensi program secara terpadu, dan mobilisasi peran semua pihak harus dilakukan. Cara memandang sumber daya alam secara sempit dan terbatas pada batas wilayah administratif perlu dihindari. Karena banjir dan longsor tidak mengenal batas wilayah administratif. Kerjasama lintas wilayah administratif dengan pendekatan pengelolaan kawasan secara terpadu perlu dibangun bersama (Maring, 2006).

Pengelolaan daerah aliran sungai perlu memperhitungkan semua aspek fisik, sosial budaya, ekonomi dan politik. Perlu pula diperkuat skema pembiayaan bersama dan distribusi manfaat secara adil antara daerah hulu dan hilir untuk kebutuhan konservasi. Kearifan masyarakat lokal dalam merawat alam sebagai totalitas komunitas ekologis perlu diapresiasi dan diperkuat. Ada bukti di mana masyarakat mampu menempatkan dirinya sebagai bagian integral dari alam dan berperilaku penuh tanggung jawab, peduli dan merawat alam lingkungannya. Meskipun ada kasus di mana kearifan itu hancur karena akibat kekuatan yang datang dari luar diri mereka. Mentalitas eksploitasi sumber daya alam yang melampaui daya dukung untuk tujuan ekonomi perlu dihindari. Di sisi lain usaha untuk internalisasi, pelembagaan kesadaran dan tindakan bio-konservasi secara bersama harus menjadi agenda serius.

Fenomena banjir rutin mestinya menyadarkan kita untuk membangun perilaku kolektif-konstruktif terhadap alam. Perilaku kolektif-konstruktif harus diwujudkan dalam aksi-aksi penanaman kembali atas lahan gundul, pemeliharaan bantaran sungai, normalisasi sungai/danau, pengolahan sampah, malu membuang sampah ke sungai, yang dilakukan secara kolektif untuk kepentingan bersama. Perilaku tersebut harus dipertontonkan secara kolektif di wilayah hulu dan hilir. Prakarsa kolektif-konstruktif terhadap alam sulit muncul dari mereka yang menjadi bagian benang kusut itu. Para korban banjir secara berulang kerap meratapi nasib tetapi enggan pindah. Para penguasa/ aparat yang berorientasi pada kekuasaan kerap mengaitkan penyelamatan lingkungan dengan nasib kekuasaannya. Para pengelola proyek infrastruktur kerap berpihak pada keuntungan pribadinya. Karenanya, membangun perilaku kolektif-konstruktif terhadap alam butuh kepemimpinan perilaku yang bisa bergerak pada proses politik dan aksi lapangan, dan memobilisasi dukungan anggaran, kerjasama lintas sektor/ wilayah, perencanaan terpadu, dan penegakan aturan secara konsisten.

C. KESIMPULAN

Kemandekan tata kelola bantaran sungai mendorong lahirnya perilaku kompetitif dan aksi ambil untung secara kolektif atas sumberdaya bantaran sungai. Kemandekan tata kelola terlihat dalam ketidakpastian pengaturan penguasaan sumberdaya, ketidakpastian penegakan aturan, dan tersendatnya penerapan program penataan bantaran sungai. Perilaku ambil untung secara kolektif terlihat dalam bentuk persaingan penguasaan sumberdaya, perampasan daerah aliran sungai, perilaku ambil untung, perilaku buang sampah, dan buruknya pengelolaan sampah. Hal ini memperkuat karakter bantaran sungai yang berciri terbuka dan menyerap kehadiran masyarakat secara berlebih di bantaran sungai.

Konstruksi struktur sosial komunitas bantaran sungai Ciliwung berciri heterogen dan tidak mencerminkan *dominant culture*. Struktur sosial heterogen tersebut sejalan dengan pola interaksi sosial yang dibangun pada tingkat intrakelompok/asal-usul dan pola interaksi antarkelompok/asal-usul. Pelajaran yang bisa ditarik dari

proses membangun relasi-interaksi sosial yang dijalankan masyarakat bantaran sungai adalah lahirnya konstruksi struktur sosial yang berlapis-lapis, berulang, dan bertumpang-tindih peran sebagai respon terhadap realitas banjir yang berulang yang dihadapi masyarakat bantaran sungai. Struktur sosial yang dibangun selalu berorientasi pada fungsi-fungsi untuk saling membantu dan meringankan tekanan yang diakibatkan banjir.

Banjir yang terjadi secara berulang, di satu sisi mendorong masyarakat mengembangkan struktur sosial dan strategi sosialnya, tetapi pada sisi lain melahirkan cara pandang negatif atas sungai. Sungai tidak hanya dilihat sebagai *resources* yang harus diperlihara dan dirawat, tetapi sebagai sumberdaya yang diperebutkan. Konsepsi *public goods* yang harus dikelola secara baik berubah menjadi *public bads* di mana bantaran sungai dijadikan tempat pembuangan sampah, tindakan penyempitan aliran air, dan pendangkalan sungai. Bantaran sungai Ciliwung menjadi arena pertarungan, persaingan, dan perebutan sumberdaya yang diperagakan banyak pihak.

Untuk mengatasi kemandekan pembangunan bantaran sungai diperlukan proses kolektif untuk membangun perilaku konstruktif berupa aksi penanaman lahan gundul, pemeliharaan bantaran sungai, normalisasi sungai/danau, pengolahan sampah, dan memupuk rasa malu membuang sampah ke sungai. Perilaku tersebut harus dipelihara secara kolektif di wilayah hulu dan hilir oleh berbagai aktor seperti pemerintah, legislatif, tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat. Tragedi banjir bersumber dari menguatnya perilaku kompetitif dan aksi ambil untung secara berlebih atas sumberdaya. Banjir menimbulkan kerusakan fisik-materi luar biasa, namun tidak cukup diselesaikan melalui konstruksi fisik-materi semata. Penyelesaian tragedi banjir perlu memberi perhatian pada proses konstruksi perilaku kolektif-konstruktif terhadap alam.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang membiayai penelitian melalui Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 0263/E5/2014 tentang Penetapan Pemenang Hibah Penelitian Tahun 2014 dan ditindaklanjuti melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Tahun Anggaran 2014 Nomor: 213//K3/KM/2014 Tanggal 7 Mei 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, S. dan Virhani, Mohan Rifqo, 2009. *Informasi Bencana dan Budaya Lokal (Kasus Penanggulangan Banjir di Kelurahan Bukit Duri Jakarta Selatan)*. Puslit Aptel SKDI Balitbang Sumber Daya Manusia, DepKomInfo. Sumber: [http:// balitbang.kominfo.go.id/balitbang/aptika-ikp/files/2013/02/KAJIAN-BENCANA BANJIR-JAKARTA.pdf](http://balitbang.kominfo.go.id/balitbang/aptika-ikp/files/2013/02/KAJIAN-BENCANA BANJIR-JAKARTA.pdf). Akses: 4 Nopember 2014.
- Anonim, 2014. *Komunitas Ciliwung Condet: Konservasi DAS Ciliwung*. Sumber: <http://komunitasciliwungcondet.blogspot.com>. Akses: 9 Nopember 2014.
- BPDAS Citarum-Ciliwung, 2009. *Laporan Akhir Tahun: Penyusunan Rencana Detil Penanganan Banjir di Wilayah JABODETABEKJUR*. Kementerian Kehutanan, Ditjen RLPS, BPDAS Citarum-Ciliwung. Sumber: <http://bebasbanjir2025.wordpress.com/konsep-pemerintah/bpdas-citarum-ciliwung/>. Akses: 4 Agustus 2014.

- BPS, 2012. **Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Kecamatan**. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Christanto, Joko, 2010. **Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Sosial Perkotaan dalam Rangka Meningkatkan Daya Dukung di Kawasan di Wilayah DKI Jakarta**, Jurnal Ekosains, Vol. II No. 1, Maret 2010.
- Creswell, J. W., 2010. **Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed**, Edisi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, Clifford, 1963. **Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia**. Berkeley: University of California Press.
- Hardin, Garrett, 1968. "Tragedi Memanfaatkan Milik Umum" dalam David C. Korten dan Sjahrir, 1988 (Eds.), **Pembangunan Berdimensi Kerakyatan**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irawaty, Dian Tri, 2012. **Diskusi Normalisasi Sungai Ciliwung**. Sumber: rujak.org/2012/08/diskusi-normalisasi-sungai-ciliwung. Akses: 4 Agustus 2014.
- Karim, Mulyawan, 2007. **Banten dan Involusi Peradaban Kehidupan di Desa**. KOMPAS: 17 September 2007.
- Khasan, M., dan Widjanarko, M., 2012. **Perilaku Coping Masyarakat Menghadapi Banjir**. Jurnal Psikologi Pitutur, Volume I. Nomor 2, Juni 2012.
- Lipsky, Michael, 1980. **Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services**. New York: Russel Sage Foundation
- Lubis, Zulkifli, 2005. **Kanalisis Ketegangan Etnik dan Kompetisi Budaya dalam Sektor Publik**, Jurnal Antropologi Sosial Budaya, ETNOVISI, Vol. 1, Nomor 2, Oktober 2005
- Maring, Prudensius, et al, 2014. **Potret Strategi Sosial Masyarakat Bantaran Sungai Ciliwung**. Artikel dalam proses penerbitan di Jurnal Ilmiah Komunitas, UNES, Semarang.
- _____, 2009. **"Involusi dan Transformasi Pertanian NTT: Sebuah Sudut Pandang Antropologi Ekologi"**. Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Politeknik Pertanian Negeri Kupang.
- _____, 2007. **"Involusi Kekuasaan"**, Opini, Jakarta: Harian KOMPAS: 5 Juli 2007.
- _____, 2007. **"Banjir Berulang dan Jerat Kemiskinan"**, Opini, Jakarta: Harian Seputar Indonesia: 16/2/2007.
- _____, 2006. **"Banjir dan Perilaku Manusia"**, Opini, Jakarta: Harian Seputar Indonesia: 30/12/2006.
- Mikmah, Siti Khoirun, 2010. **Studi Sungai Ciliwung Pengabaian Pemerintah Terhadap Eksistensi Penduduk Pinggir Sungai: Wajah Pengelolaan Sungai di Indonesia**, Jakarta: INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*). Sumber: konservasiasungai.files.wordpress.com/2012/05. Akses: 4 Agustus 2014.
- Saifuddin, A. F., 2005. **Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma**. Jakarta: Prenada Media.
- _____, 2007. **Kemiskinan di Indonesia: Realitas di Balik Angka**. Orasi Ilmiah dalam rangka Pengukuhan Sebagai Guru Besar Antropologi FISIP UI, 24 Januari 2007. Universitas Indonesia.
- _____, 2009. **Refleksi Pemikiran Geertz: Involusi Pertanian, Involusi Kita**. Sumber: Kompas Cyber Media: www.duniaesai.com/antro. Akses 12 Oktober 2009.
- Suminar, Sri, dkk, 2011. **Strategi Penyusunan Pola Tata Komunitas Berbasis Partisipasi Masyarakat Bantaran Sungai Winongso**, Jurnal Penelitian BAPPEDA Kota Yogyakarta, No. 6 April 2011, ISSN 1978.0052.
- Suparlan, Parsudi, 2004. **Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan: Persektif Antropologi Perkotaan**, Yayasan Pengembangan Kajian Kepolisian.
- _____, 1999. **"Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan, dan Kesukubangsaan."** dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 58 Thn 1999.
- Tim Ekspedisi Ciliwung KOMPAS, 2009. **Ekspedisi Ciliwung: Laporan Jurnalistik Kompas**, Jakarta: Penerbit Kompas.